

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya Berbagai macam perubahan pada sektor perekonomian dapat menimbulkan terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang diikuti juga bertumbuhnya produksi dalam negeri, meningkatnya pendapatan dalam negeri, dan meningkatnya pendapatan perkapita. Contoh perubahan-perubahan pada sektor perekonomian adalah seperti pendirian berbagai macam industri bisnis yang baru dan peningkatan pada sektor ekspor-impor dapat memberikan perubahan pada sektor industri dan sektor perdagangan yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut merupakan tujuan pembangunan yang diinginkan oleh seluruh negara. Istilah pertumbuhan ekonomi dipakai sebagai gambaran atas terjadinya perkembangan atau kemajuan perekonomian pada suatu negara. Salah satu indikasi keberhasilan suatu negara adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri memiliki arti sebagai kemajuan dalam kegiatan perekonomian yang membuat barang dan jasa yang di produksi didalam masyarakat meningkat dan tumbuhnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat (Daniel, 2018). Dalam jurnal Ofoegbu et al., (2016), dikatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya intervensi kebijakan yang ditujukan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Fokus perhatiannya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengenalan produk baru, layanan yang menggunakan teknologi modern, mitigasi risiko, dinamika inovasi, dan kewirausahaan. Tujuan pembangunan ekonomi itu untuk membuat lingkungan yang sesuai untuk masyarakat agar dapat mengembangkan cara baru dalam memproduksi barang yang berkualitas dan dapat memimpin dalam pengeskporan barang ke luar negeri. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi secara khusus merupakan peningkatan nilai barang atau jasa pada suatu negara selama suatu periode dan menggunakan peningkatan PDB suatu negara untuk mengukurnya. Maka dari itu sangat memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pembangunan ekonomi dalam

jangka pendek ataupun menengah. Dengan kata lain kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diciptakan melalui investasi dari pendapatan nasional dalam pembangunan di bidang infrastruktur dan selanjutnya digunakan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat suatu negara (Ofoegbu et al., 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya yaitu penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi.

Peran pemerintah sebagai tokoh utama dalam penyelenggara kenegaraan sangatlah vital untuk menentukan serta mengarahkan kebijakan dalam pembangunan suatu negara. Sebagai pihak yang melakukan penyelenggaraan pembangunan suatu negara, pemerintah sangat bergantung terhadap pendapatan dalam negeri yang mayoritasnya berasal dari pemasukan/penerimaan atas pajak. Penerimaan pajak di Indonesia biasanya berasal dari pajak penghasilan (PPH) individu atau badan serta pajak pertambahan nilai (PPN). Meskipun PPh dan PPN memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak, pemerintah harus terus melakukan berbagai macam cara agar dapat meningkatkan penerimaan pajak tersebut serta pajak lainnya. salah satu cara tersebut adalah dengan melakukan beberapa reformasi pajak daerah. Ada tiga indikator dalam menentukan berhasilnya reformasi perpajakan yaitu berkaitan dengan birokrasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif serta efisien, dan juga kualitas dari pelayanan terhadap masyarakat yang bagus (Saragih, 2018). Maksud dari tiga indikator itu adalah bersih atau sehat dari tindak korupsi, dapat membuat prosedur pajak yang efektif serta efisien agar memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masing-masing, dan meningkatnya kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kesempatan yang bagus untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan terkait ketiga indikator tersebut karena adanya perkembangan dalam bidang teknologi dan internet. Pemerintah dapat menggunakan internet untuk mengembangkan sistem serta fasilitas yang dapat memperbarui dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan tata cara yang mudah dalam membayar kewajiban pajaknya. Sumber utama pendapatan publik dan juga dasar dari kebijakan ekonomi yang berlaku asalnya

adalah dari penerimaan pajak dalam negeri. pemasukan dari pajak tersebut dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan bagi Indonesia di dalam persaingan global. Oleh karena itu, pengoptimalisasian penerimaan pajak sangatlah diperlukan, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara melainkan juga sebagai suatu sarana kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur roda perekonomian di Indonesia. Kebijakan pajak ini sangat diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam tingkat global (Sihaloho, 2020a). Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui belanja pembangunan atau modal sumbernya juga berasal dari penerimaan pajak. Pajak sendiri adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi pemasukan negara disamping pendapatan dari nonpajak yaitu migas ataupun nonmigas. Sumber pendapatan negara hampir seluruhnya berasal dari pemasukan atas pajak, yakni mencapai sebesar 75 persen berasal dari sektor tersebut. Oleh karena itu, pajak sebagai pendapatan pemerintahan merupakan unsur yang sangat signifikan dalam memenuhi APBN (Sumaryani, 2019). Apabila penerimaan pajaknya tinggi, negara dapat terpicu untuk meningkatkan pengeluaran belanja oleh pemerintah dan memacu perekonomian yang akhirnya menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dalam jurnal Ardani et al., (2010) keterkaitan antara pajak dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh teori yang diutarakan Peacock dan Wiseman, mereka beranggapan jika terjadinya pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan terhadap pajak akan mengalami peningkatan meskipun tarif pajaknya tetap sama yang akan mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak yang juga mengakibatkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Atas dasar itu, dalam keadaan normal, peningkatan atas PDB juga menyebabkan pendapatan pemerintah semakin besar, namun diikuti dengan pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah juga. Penerimaan negara dalam membiayai pembangunan untuk menjalankan roda pemerintahan sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi atas penerimaan pajak. Penerimaan negara yang merata akibat tingginya tingkat penerimaan pajak kepada pemerintah dapat melancarkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar (Sihaloho, 2020). Lalu fungsi dan tugas atas

penerimaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan penghimpunan pajak daerah, retribusi, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak pemerintah pusat (Sumaryani, 2019). Adapun berbagai macam jenis pajak yang dikendalikan atau diatur Direktorat Jendral Pajak diantaranya (1) pajak pertambahan nilai (PPN), (2) pajak penghasilan (PPh), (3) pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), (4) pajak Bea dan Materai, dan (5) pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu. Dalam membiayai segala sesuatu pengeluaran negara, pemerintah terus mengusahakan bagaimana cara untuk meraih penerimaan pajak yang besar sehingga tidak perlu untuk mengutang kepada pihak-pihak ataupun negara lain.

Disamping itu, keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia seiring berjalannya waktu seringkali mengalami keadaan defisit yang dimana pengeluaran yang dilakukan oleh negara melebihi pendapatan yang diterima oleh negara. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi dikarenakan apabila negara mengalami masalah pengangguran yang serius maka kebijakan anggaran belanja defisit perlu dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Sebenarnya kebijakan anggaran defisit ini ditempuh atau dipakai oleh pemerintah untuk mensiasati agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Karena kondisi anggaran negara mengalami defisit, maka pemerintah akan menggunakan sebuah rencana yaitu mencari sumber dana dari pihak-pihak lain dengan tujuan untuk menumbuhkan laju usaha dan meningkatkan perekonomian negara. Namun disisi lain, dengan melakukan pinjaman dana dari pihak lain tersebut membuat negara akan memiliki hutang, terlebih lagi jika negara berhutang banyak. Berdasarkan informasi yang diambil dari tirto.id mantan wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan apabila pemerintah memiliki banyak hutang, maka peredaran atas uang akan terganggu dan juga Bank Indonesia harus meningkatkan suplai uang yang beredar. Peningkatan jumlah uang yang beredar tersebut dapat menyebabkan harga barang-barang menjadi meningkat atau bertambah dan akan memicu terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Dampak dari inflasi yang

tinggi serta tidak stabil mencerminkan tidak stabilnya perekonomian yang mengakibatkan naiknya harga barang atau jasa secara umum dan berkala yang memiliki imbas terhadap semakin tingginya angka tingkat kemiskinan di Indonesia. Lalu akibat dari tingginya tingkat inflasi, maka masyarakat yang sebelumnya mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu terjadi kenaikan harga barang atau jasa yang sangat tinggi menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan akhirnya timbul kemiskinan. Tingkat inflasi di Indonesia bisa dikatakan fluktuatif dari tahun 1991 hingga tahun 2020. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1991 tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 9,52 persen, pada tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 4,94 persen, pada tahun mengalami kenaikan 1993 9,77 persen, pada tahun 1994 sebesar 9,24 persen, pada tahun 1995 tingkat inflasi Indonesia mengalami penurunan ke angka 8,60 persen, pada tahun 1996 sebesar 6,50 persen, pada tahun 1997 11,10 persen, pada tahun 1998 inflasi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 77,60 persen dikarenakan pada tahun ini terjadi tragedi sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri, lalu selanjutnya pada tahun 1999 tingkat inflasi sebesar 2,00 persen, lalu sebesar 9,40 persen pada tahun 2000, lalu sebesar 12,55 persen pada tahun 2001, sebesar 10,53 persen pada tahun 2002, pada tahun 2003 sebesar 5,16 persen, pada tahun 2004 sebesar 6,40 persen, lalu pada tahun 2005 sebesar 17,11 persen, pada tahun 2006 sebesar 6,60 persen, pada tahun 2007 sebesar 6,59 persen, lalu pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen, lalu pada tahun 2009 2,78 persen, lalu pada tahun 2010 tingkat inflasi yang terjadi sebesar 6,96 persen, selanjutnya tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 3,79 persen pada tahun 2011, lalu pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,3 persen, lalu kembali mengalami peningkatan menjadi 8,38 persen pada tahun 2013, pada tahun 2014 tingkat inflasi yang terjadi cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berada di angka 8,36 persen, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,35 persen, lalu pada tahun 2016 berada di angka 3,02 persen, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3,61 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,13 persen, selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami

penurunan menjadi 2,72 persen dan terakhir pada tahun 2020 tingkat inflasinya sebesar 1,68 persen. Untuk tahun 2020, tingkat inflasi yang terjadi merupakan yang paling rendah yang pernah tercatat dalam sejarah, hal itu disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan lesunya daya beli atau permintaan masyarakat yang membuat harga jual barang usaha sulit mengalami kenaikan harga. Dari segi kebijakan moneter, inflasi memiliki pengaruh kuat terhadap pola konsumsi masyarakat serta investasi pemerintah dalam pembentukan modal bruto yang juga memiliki kaitan pada harga barang atau jasa. Inflasi ini adalah suatu fenomena moneter yang dapat membuat keresahan bagi suatu negara dikarenakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dapat menjadi *boomerang* dan akan menjadi masalah yang serius terhadap perekonomian negara khususnya pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Daniel, 2018). Akibat dari adanya permasalahan yang serius di dalam negeri dapat menimbulkan fluktuasi harga pasar dalam negeri yang akhirnya meningkatkan inflasi perekonomian. Maka dari itu pemerintah yang diwakilkan oleh Kemenkeu dan bank sentral perlu tetap waspada dan terus menjaga agar tingkat inflasi tetap terkendali.

Dikutip dari laman beritasatu.com (11/4/2021) pemerintah memberikan subsidi berupa gratis ongkir pada Hari Belanja *Online* Nasional atau yang biasa disebut dengan Harbolnas 2021. Hal ini merupakan reaksi dari pemerintah dalam upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian Indonesia yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Dengan dana subsidi sebesar Rp 500 miliar, hal ini menjadi dorongan bagi para pelaku usaha untuk membangkitkan kembali bisnis usahanya dan juga meningkatkan aktivitas perekonomian. Upaya ini disebut dengan kebijakan anggaran defisit fiskal yang berarti pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya guna untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Indonesia. Tapi disisi lain berdasarkan pernyataan menurut Imas M & Munawar, (2017) inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran defisit. Hal tersebut dikarenakan penerimaan negara yang lebih kecil daripada pengeluarannya membuat negara akan mencari tambahan dana dari pihak-pihak luar yang menimbulkan adanya hutang negara. Adanya hutang tersebut

membuat Bank Indonesia harus meningkatkan peredaran uang dengan melakukan pencetakan uang untuk membayar utang tersebut. Terlebih lagi berdasarkan informasi yang dikutip dari kontan.co.id (6/1/2021) defisit anggaran pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 956,3 triliun menurut Kemenkeu. Defisit tersebut terjadi akibat penerimaan negara yang nilainya minus 16,7 persen dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai penerimaan negara tersebut juga dipengaruhi akibat terjadinya kontraksi realisasi penerimaan pajak sebesar 19,7 persen dari tahun sebelumnya. Kontraksi penerimaan pajak tersebut terjadi akibat dampak dari adanya pandemi virus Corona yang memberikan tekanan kepada hampir seluruh sektor usaha yang membuat buruknya penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai fenomena permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai perpajakan dan memfokuskan bagaimana penerimaan pajak dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perwira, (2019); Saragih, (2018); Simanjuntak & Mukhlis, (2011a); Sumaryani, (2019) yang mengatakan jika penerimaan pajak dapat mempengaruhi secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian Ofoegbu et al., (2016), hasil yang didapatkan pada penelitian tersebut mengatakan jika penerimaan pajak tidak terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi, banyaknya pengangguran, inflasi, dan tidak memadainya layanan kesehatan meskipun penerimaan pajaknya mengalami peningkatan. Lalu diharapkan untuk penelitian ini bisa dapat memberikan hasil apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardani et al., (2010); Ardiansyah, (2017); Ningsih & Andiny, (2018); Perwira, (2019); Sumaryani, (2019) yang mengatakan jika tingkat inflasi dapat berpengaruh signifikan positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih, (2018) mengatakan indeks harga konsumen yang merupakan alat untuk mengukur tingkat inflasi, tidak memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi. Karena hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini agar dapat melihat apakah dari kedua variabel yaitu penerimaan pajak, dan tingkat inflasi memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dari tahun 1991 hingga tahun 2020.

1.2 Rumusan masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan publik dan juga menjadi dasar dari kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah serta juga dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan bagi Indonesia di persaingan global. Penerimaan pajak ini juga bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara semata, melainkan juga sebagai suatu sarana pemerintah untuk mengatur roda perekonomian di Indonesia. Sumber pendapatan negara kita ini sekitar 75 persen berasal dari pajak. Apabila penerimaan pajaknya tinggi, maka dapat memicu suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran belanja pemerintah dan memacu sektor perekonomian. Tentunya hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk mendanai segala sesuatu pengeluaran belanja negara, pemerintah terus melakukan upaya bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus melakukan peminjaman dana dari pihak-pihak lain. Apabila pemerintah melakukan peminjaman dari pihak lain maka akan menimbulkan hutang negara. Hutang negara ini dapat memicu terjadinya inflasi, terlebih jika hutang negara jumlahnya sangat banyak.

Maka dari itu, Penulis membangun beberapa rumusan masalah diantaranya:

- 1) Apakah penerimaan pajak di Indonesia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- 2) Apakah tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis buat maka tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak di Indonesia kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 2) Mengetahui apakah tingkat inflasi dapat memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan suatu ilmu bermanfaat terkait dengan bagaimana penerimaan pajak di Indonesia, dan tingkat inflasi, itu dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman mengenai bagaimana pengaruh penerimaan pajak di Indonesia, dan Tingkat Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti terkait topik ini. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang dilakukan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus pajak dalam menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait pemungutan pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar lagi dari wajib pajak dan diharapkan juga dapat membuat wajib pajak agar patuh dalam melakukan setoran wajibnya agar tidak dikenakan denda tambahan biaya akibat membayar pajak tidak tepat waktu, serta perlu lebih waspada lagi terhadap kestabilan tingkat inflasi yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak sendiripun merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia, maka

dari penerimaan pajak harus dioptimalkan penerimaannya agar terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi, kegiatan perekonomian atas barang dan jasa di masyarakat akan meningkat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.